

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

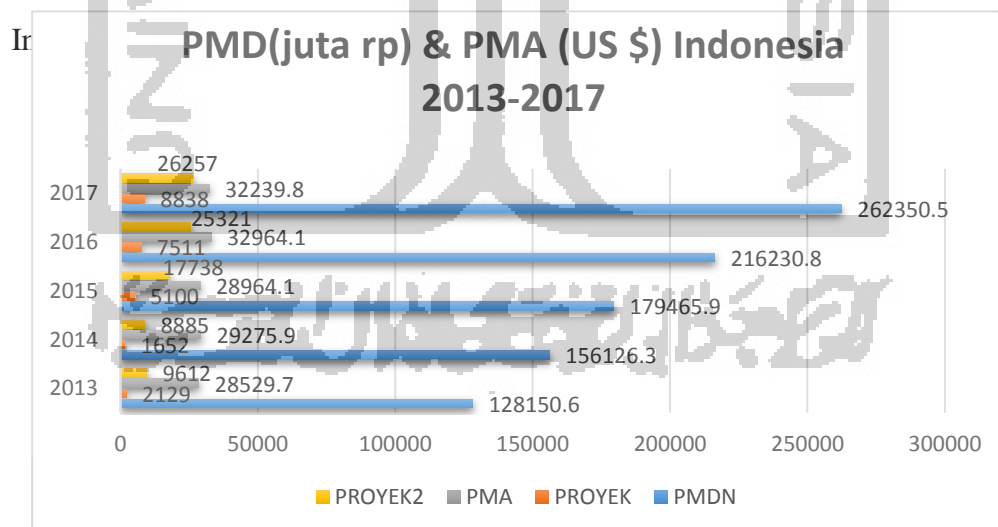
Pembangunan menjadi hal yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua negara, karena globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan telah berdampak pada perubahan dan pembaruan dalam semua aspek kehidupan manusia. Sehingga dalam proses pembangunan harus mencakup aspek ekonomi maupun sosial.

Seperti yang terdapat dalam Todaro (2006:28), menyebutkan pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang baik. Keberhasilan pembangunan sering identik dengan tingkat pertumbuhannya, karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi dan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 menyebutkan bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi Indonesia adalah masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembentukan masyarakat yang adil dan makmur maka diperlukan kesejahteraan yang merata. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang tidak miskin dan menjadi keinginan setiap orang, sedangkan kemakmuran merupakan bagian yang memungkinkan orang-orang bermasyarakat dengan baik, tenang dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial (Dumairy, 1996:65-66).

Tetapi dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia tidak diimbangi dengan keadilan dan pemerataan. Dampaknya yang langsung terlihat adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya wilayah maju (*Development Region*) dengan wilayah terbelakang atau kurang maju (*Underdevelopment Region*).

Untuk itu maka diperlukan suatu kebijakan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan yang disertai dengan pemerataan pembangunan infrastruktur yang diharapkan berdampak pada terciptanya iklim investasi yang baik antar wilayah. Dengan adanya investasi maka akan menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi dengan cara mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi (Kuncoro, 2010:4) seperti yang terlihat dalam Tabel 1, terkait perkembangan PMD dan PMA di

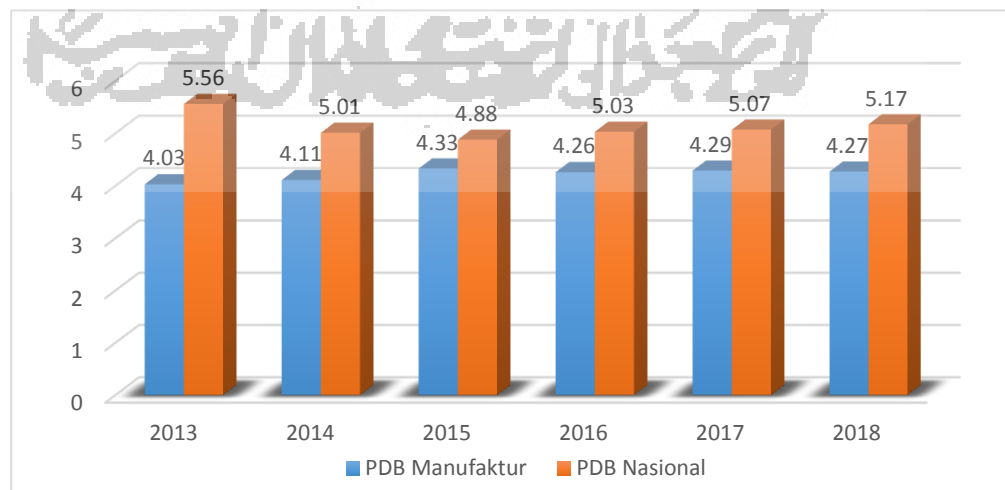


Sumber: Badan Pusat Statistik 2019, diolah

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan PMD (JutaRP) dan PMA (US \$) di Indonesia**  
**2013-2017**

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan adanya peningkatan perencanaan penanaman modal dalam bidang industri khususnya PMDN pada tahun 2016 sebesar 216230.8 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 262350.5 peningkatan tersebut ternyata disertai dengan peningkatan jumlah proyek industri sedangkan dalam bidang PMA meskipun penanaman modalnya lebih besar dibandingkan dengan PMDN tetapi peningkatan dan penurunannya tidak terlalu fluktuatif pada tahun 2013-2015.

Pemerintah memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Terbukti dari adanya tingkatan pertumbuhan sektor industri karena tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah yang mengutamakan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung kegiatan masyarakat dan perekonomian nasional. Seperti yang terlihat dalam Tabel 2 laju pertumbuhan PDB industri manufaktur dan pertumbuhan Indonesia.



*Sumber: Badan Pusat Statistik 2019, diolah.*

**Tabel 1.2**  
**Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur dan PDB Nasional**  
**2013-2018**

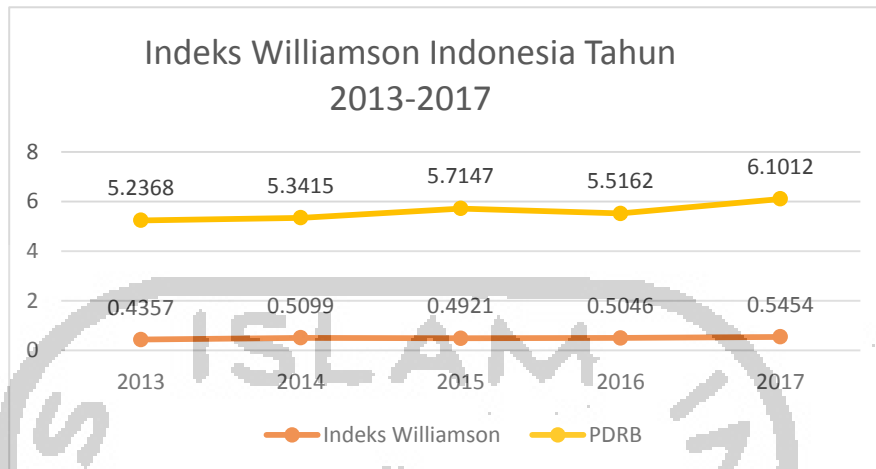
Tampak bahwa pertumbuhan PDB tertinggi dalam sektor industri manufaktur pada tahun 2015 sebesar 4,33 persen sedangkan pertumbuhan terkecil industri manufaktur terjadi pada tahun 2013 sebesar 4.03 persen. Sedangkan pertumbuhan Nasional tertinggi pada tahun 2017 sebesar 5.07 persen dan terus meningkat hingga 2018 sebesar 5.17 persen.

Namun pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak berarti semua wilayahnya memiliki tingkat pertumbuhan yang sama karena setiap daerah memiliki perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong pembangunan juga menjadi berbeda. Pertumbuhan hanya bisa terjadi di beberapa tempat yang menjadikan pusat pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda ( Perroux dikutip dalam Arsyad, 1999:147). Dari kenyataan tersebut, kesenjangan dan ketimpangan antarwilayah merupakan konsekuensi logis pembangunan dan merupakan tahapan dalam pembangunan itu sendiri. Perbedaan tingkat kemajuan pembangunan ekonomi antarwilayah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh terhadap keuntungan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan dan pembangunan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan.

Tetapi tidak sepenuhnya ketimpangan memiliki dampak negatif terhadap pembangunan, ada dampak positif dari ketimpangan pembangunan yaitu untuk mendorong daerah tertinggal yang mengalami ketimpangan untuk bangkit dan meningkatkan pertumbuhan. Namun dampak negatif dari ketimpangan sering kali dipandang tidak adil dan menghambat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Indikasi terjadi ketimpangan pembangunan di Indonesia berasal dari kontribusi yang berbeda dari berbagai sektor, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah yang berbeda, khususnya di wilayah kota dan kabupaten.

Sumbangan terbesar PDRB terdiri dari sektor industri, sektor perdagangan, sektor hotel dan restoran. Sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat Indonesia, tidak berkontribusi besar terhadap PDRB. Akibat PDRB yang berbeda di wilayah kota yang sebagian besar bergerak di bidang industri, perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan wilayah kabupaten sebagian besar bergerak di bidang pertanian. Oleh karena itu terjadi kemajuan pembangunan di wilayah kota yang lebih cepat dibandingkan wilayah kabupaten.

Ketimpangan pembangunan dapat diukur dengan menggunakan perhitungan *Indeks Williamson*, dasar perhitungannya adalah dengan memperhitungkan PDRB perkapita dengan jumlah penduduk per provinsi ditunjukkan dengan angka 0 sampai angka 1 atau  $0 < VW < 1$ . Berikut ini adalah Indeks Williamson Indonesia tahun 2013-2017 :



**Gambar 1.3**  
**Indeks Williamson Indonesia Tahun**  
**2013-2017**

Tingkat ketimpangan Indonesia cenderung memeningkat dari tahun 2013-2017. Tahun 2013 merupakan tingkat ketimpangan terendah sebesar 0,4357 persen diikuti dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2368 persen. Tahun 2017 merupakan tingkat ketimpangan tertinggi sebesar 0,5454 persen, diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1012 persen.

Sejalan penelitian yang dilakukan oleh Ginting, A. M. (2014) mengenai ketimpangan pembangunan Indonesia. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB per Kapita dan jumlah investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Sedangkan aglomerasi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan indonesia, artinya solusi dalam mengurangi ketimpangan Indonesia adalah dengan meningkatkan pendapatan dan pemerataan investasi di seluruh Indonesia.

Dari penelitian tersebut, penulisan skripsi ini peneliti melakukan replikasi dengan memilih tema yang sama mengenai Ketimpangan Pembangunan Indonesia tetapi dengan tahun yang berbeda sebagai objek penelitian. Tujuannya

adalah untuk mengetahui perubahan kondisi era presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kondisi era Presiden Joko Widodo, apakah mengurangi atau meningkatkan ketimpangan pembangunan Indonesia.

Kekayaan alam yang dimiliki beberapa daerah tidak mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah diduga akibat kurangnya elit politik dalam penegakkan kontrak dan kebijakan (Bhattacharyya & Hodler, 2014). Dalam penelitian kali ini selain membahas faktor ekonomi berupa *Indeks Williamson*, Laju Pertumbuhan Ekonomi, jumlah Industri dan investasi, tetapi peneliti menghadirkan faktor non ekonomi berupa infrastruktur publik yaitu kapasitas listrik yang Didistribusikan per provinsi. Sehingga penelitian ini akan membahas **“Ketimpangan Pembangunan Daerah Antar Provinsi Di Indonesia 2013-2017”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor ekonomi yaitu *Indeks Williamson*, Investasi (Pemodal Dalam Negeri dan Pemodal Luar Negeri), Jumlah Industri dan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu peneliti menambahkan faktor non ekonomi yaitu Listrik (Kapasitas Listrik yang Didistribusikan setiap Provinsi). Faktor ekonomi dan faktor non ekonomi akan dianalisis terhadap ketimpangan pembangunan per provinsi di Indonesia. Berdasarkan data yang disajikan pada latar belakang, pertanyaan peneliti sebagai berikut:

- A. Menganalisis kondisi ketimpangan pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia 2013-2017

B. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia 2013-2017, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana Penanaman Modal Luar Negeri Berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia?
4. Bagaimana Jumlah Industri berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia?
5. Bagaimana Distribusi Listrik berpengaruh terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017.
2. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap Ketimpangan berpengaruh Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017.
3. Menganalisis pengaruh Penanaman Modal Luar Negeri terhadap Ketimpangan berpengaruh Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017.



4. Menganalisis pengaruh jumlah industri terhadap Ketimpangan berpengaruh Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017.
5. Menganalisis pengaruh Distribusi Listrik terhadap Ketimpangan berpengaruh Pembangunan Daerah per Provinsi di Indonesia Tahun 2013-2017.

#### **1.4. Mamfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada:

1. Bagi peneliti sendiri dapat memberikan mamfaat pencerahan serta mengimplementasikan materi kepada lingkungan pendidikan dan sebagai referensi bagi akademik dalam mengkaji analisis faktor-faktor penyebab ketimpangan pembangunan di Indonesia secara teoritis dan empiris.
2. Bagi pengambil kebijakan, peneliti ini diharapkan mampu memberikan informasi dan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah.